

PENGARUH BELANJA MODAL DAN INVESTASI TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH

Oleh:
Hendri Panggayuh¹⁾

¹⁾ SMA Negeri 1 Teweh Timur, Barito Utara
Email: hendri.panggayuh@gmail.com

ABSTRACT

Economic development is currently influenced by the internal policies of local governments, such as the large proportion of government expenditure allocated. In order to compensate for the performance of economic development, hence the need for the role of government and the private sector need to be improved, where investment as one of the alternatives in order to achieve the economic development. How big is the minimal requirements and the extent of correlation with indicators of successful economic development as the human development index, the economic growth rate, per capita income, poverty, and the open unemployment rate. The aims of this research are to determine the development of the human development index, the rate of population growth, per capita income, poverty, and the open unemployment rate, determine the effect of capital expenditure and investment towards human development index, the economic growth rate, income per capita, the poor, and the open unemployment rate. The analytical method used to test the hypothesis is boxplot analysis, cluster analysis and regression analysis. Based on the research, it is known that there are three classes in the economic development in Central Java province, of which the first class to have a common index of human development, and the growth rate of economics are in Cilacap district, Magelang City, Surakarta, Semarang and City Pekalongan. Grades two to have similar levels of percentage of the poor and the jobless rate was in Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Salatiga, Tegal. Grades three to have a high per capita income only in Kudus. Based on the results of multiple linear regression analysis can be concluded capex and investment affect the human development index together, but if only partially affect the human development index. Capex will affect the rate of economic growth partially, while investment did not affect the rate of economic growth. The allocation of capital expenditures and investments affect the income per capita together and partially. The allocation of capital expenditures and investment affect poor people together, if partially obtained that the investment variables that negatively affect the percentage of poor people, while the variable capital expenditure does not affect the percentage of poor people. The allocation of capital expenditures and investments do not affect the level of unemployment together and partially.

Keywords: Capital Expenditure, Investments, Economic Development

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah digalakkan oleh pemerintah daerah dengan cara meningkatkan belanja modal. Belanja modal ini memiliki tingkat efektifitas yang besar dalam pembangunan yang hasilnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum seperti pada pembangunan infrastruktur penting seperti jalan raya. Adapun belanja pegawai merupakan belanja barang, gaji pegawai negeri dan pembayaran utang yang dikategorikan sebagai belanja rutin karena sebagian besar dialokasikan untuk keperluan operasional di mana belanja rutin memiliki tingkat efektifitas relatif rendah terhadap pembangunan ekonomi daerah. Hal tersebut karena belanja untuk gaji sebagian masuk ke rekening tabungan pegawai serta sebagian besar dibelanjakan oleh yang bersangkutan untuk konsumsi rumah tangga. Sedangkan belanja barang dan jasa pemerintah sebagian besar ditujukan untuk operasional kantor

dan persediaan barang yang menjadi tanggungjawab pemerintah. Pihak yang mendapat keuntungan langsung adalah para suplier pemerintah sebagai pemenang lelang pengadaan barang. Dengan demikian, apabila proporsi anggaran belanja modal rendah akan dapat memperlambat proses pembangunan ekonomi, sehingga perekonomian daerah dimungkinkan akan tergantung pada belanja rutin pemerintah yang memiliki tingkat efektifitas yang rendah.

Proses pembangunan ekonomi seharusnya didasarkan atas kemampuan daerah itu sendiri, di mana mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki. Namun dalam kenyataannya masih banyak daerah yang mengalami hambatan dalam membangun perekonomiannya, karena keterbatasan sumber daya, teknologi, dan modal. Belanja modal yang seharusnya dapat berkontribusi lebih dalam kenyataannya masih sangat jauh dari yang diharapkan, di mana belanja pegawai masih menjadi belanja dominan dalam

setiap realisasi APBD. Dengan demikian, peran swasta memiliki kontribusi yang cukup penting dalam percepatan tercapainya pembangunan ekonomi, di mana peran swasta melalui Penanaman Modal atau Investasi, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Investasi dengan mendirikan perusahaan baru atau meningkatkan kemampuan produksi akan mampu memberikan *multiplier effect* yang besar terhadap peningkatan pembangunan ekonomi, salah satunya adalah dapat membantu mengurangi angka pengangguran dengan terbukanya berbagai kesempatan kerja, sehingga mendorong berkurangnya angka kemiskinan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori ekonomi telah menunjukkan bagaimana pengeluaran pemerintah bisa menguntungkan atau merugikan pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Menurut Keynesian, banyak macam pembelanjaan pemerintah, yang secara alami, dapat mendukung secara positif menuju ekonomi pertumbuhan, melalui *multiplier effect* pada permintaan agregat. Pada sisi lain, konsumsi pemerintah bisa mendesak investasi rumah tangga melicinkan stimulus ekonomi dalam jangka pendek dan mengurangi akumulasi modal dalam jangka panjang. Sebenarnya, pendesakan ada kaitannya dengan defisit fiskal dan yang dihubungkan dengan efek tingkat bunga (Sukirno, 2004: 201).

Pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Total pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada tingkatan pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah. Pada masing-masing tingkatan dalam pemerintahan ini mempunyai keputusan akhir yang berbeda dan hanya beberapa hal pemerintah yang di bawahnya dapat dipengaruhi oleh pemerintah yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dalam memahami berbagai pengaturan pendanaan bagi pemerintah pusat maupun daerah, maka harus mengetahui keragaman fungsi yang dibebankannya. Fungsi tersebut adalah fungsi penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan kemasyarakatan, fungsi pengaturan yakni merumuskan dan menegakkan pusat perundangan, fungsi pembangunan, keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam bentuk-bentuk kegiatan ekonomi dan penyediaan prasarana, fungsi perwakilan yaitu menyatakan pendapat daerah di luar bidang tanggungjawab eksekutif, dan fungsi koordinasi yakni melaksanakan koordinasi dan perencanaan investasi dan tata guna tanah regional (Sodik, 2007: 44)

Peningkatan pengeluaran pemerintah akan menyebabkan semakin meningkatkan pendapatan

daerah, karena peningkatan *aggregat demand* akan mendorong kenaikan investasi dan pada akhirnya menyebabkan kenaikan produksi. Investasi merupakan suatu faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi (*sustainable development*) jangka panjang. Pembangunan ekonomi melibatkan kegiatan-kegiatan produksi barang dan jasa di semua sektor ekonomi. Dengan adanya kegiatan produksi, maka terciptalah kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat, yang selanjutnya menciptakan dan meningkatkan permintaan di pasar. Pasar berkembang dan berarti juga volume kegiatan produksi, kesempatan kerja dan pendapatan di dalam negeri meningkat dan seterusnya, maka terciptalah pembangunan ekonomi (Tambunan, 2001: 132).

Secara lebih spesifik, untuk melihat hubungan belanja modal, investasi dan pembangunan ekonomi dapat didekati dengan model pertumbuhan ekonomi modern yaitu model pertumbuhan endogen (*endogenous growth model-EGM*) yang memasuki aspek-aspek endogenitas dan eksternalitas di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Sifat keberadaan teknologi tidak lagi *given*, tetapi merupakan salah satu faktor produksi yang dinamis. Demikian juga halnya dengan faktor manusia, tenaga kerja di dalam fungsi produksi tidak lagi merupakan suatu faktor yang eksogen, tetapi bisa berkembang mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan menjadi faktor-faktor pertumbuhan yang penting. EGM juga sangat relevan untuk menganalisis laju serta pola pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terutama karena dampak dari progres teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di dalam negeri semakin tampak jelas saat ini dibandingkan misalnya 30 tahun yang lalu.

METODE PENELITIAN

1. Analisis *Boxplot*

Kelebihan dari penggunaan *boxplot* yaitu ringkasan dari data ditampilkan dalam bentuk 1 grafik yang mengandung informasi mengenai *location, spread, skewness, dan long tailedness* yang dapat terlihat dengan cepat. *Boxplot* menunjukkan informasi detail tentang observasi pada bagian akhir. Jika terdapat suatu angka yang menarik dari observasi, angka tersebut biasanya akan terlihat pada bagian akhir *boxplot*. Distribusi dari kumpulan data-data dapat dibandingkan dengan mudah dengan cara memperlihatkan *boxplot* data-data tersebut secara berdampingan. *Boxplot* didesain dengan metode grafik *back-of-*

the-envelope, sehingga mudah dihitung dan diimplementasikan pada komputer.

2. Analisis Cluster

Cluster dapat diartikan kelompok dengan demikian pada dasarnya analisis *cluster* akan menghasilkan sejumlah *cluster* atau kelompok. Proses pengolahan data sehingga sekumpulan data mentah dapat dikelompokkan menjadi satu atau beberapa *cluster* adalah sebagai berikut:

a. Menetapkan ukuran jarak antar-data
Mengukur kesamaan antar-objek (*similarity*). Sesuai prinsip dasar *cluster* yang mengelompokkan objek yang mempunyai kemiripan, maka proses pertama adalah mengukur seberapa jauh ada kesamaan antar-objek. Ada tiga metode yang digunakan diantaranya :

1) Mengukur korelasi antara sepasang objek pada beberapa variabel, di mana jika beberapa data memang akan tergabung menjadi satu *cluster*, tentulah di antara data tersebut terdapat hubungan yang erat. Metode ini mendasarkan besaran korelasi antara data untuk mengetahui kemiripan data satu dengan yang lain, jika ukuran menggunakan nilai mutlak dari korelasinya di mana ukuran kemiripan dari objek ke *i* terhadap objek ke *j* dinotasikan d_{ij} dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$d_{ij} = 1 - |r_{ij}|$$

di mana, r_{ij} merupakan nilai koefisien korelasi antara objek ke-*i* dan objek ke-*j* dan merupakan nilai mutlaknya.

2) Mengukur jarak (*distance*) antara dua objek, pengukuran menggunakan metode *Euclidean distance*, di mana cara ini akan memasukkan sebuah data ke dalam *cluster* tertentu dengan mengukur jarak data tersebut dengan pusat *cluster*. Jika data ada dalam jarak yang masih ada dalam batas tertentu, data tersebut dapat dimasukkan pada *cluster* tersebut.

3) Mengukur asosiasi antar-objek, pada dasarnya mengasosiasikan sebuah data dengan *cluster* tertentu.

b. Melakukan proses standarisasi data jika diperlukan, Setelah cara mengukur jarak ditetapkan, hal yang perlu diperhatikan adalah apakah satuan data mempunyai perbedaan yang besar, jika hal ini terjadi maka membuat perhitungan jarak (*distance*) menjadi tidak valid. Dengan demikian dilakukan proses standarisasi dengan mengubah data yang ada ke *Z-Score*. Proses standarisasi menjadi dua data dengan perbedaan satuan yang lebar akan otomatis menjadi menyempit. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$z = \frac{x_i - \bar{x}}{\sigma}$$

di mana,

x_i = data ke-*i*

\bar{x} = rata-rata data

σ = simpangan baku

c. Melakukan proses *clustering*, Setelah data yang dianggap mempunyai satuan yang sangat berbeda diseragamkan dan metode *cluster* ditentukan, langkah selanjutnya adalah membuat *cluster*. Proses *clustering* adalah pengelompokkan data, terdapat dua metode, diantaranya :

1) *Hierarchical method*, metode ini memulai pengelompokkan dengan dua atau lebih objek yang mempunyai kesamaan paling dekat. Kemudian proses diteruskan ke objek lain yang mempunyai kedekatan kedua. Demikian seterusnya sehingga *cluster* akan membentuk semacam pohon di mana ada hierarki (tingkatan) yang jelas antar-objek, dari paling mirip sampai paling tidak mirip. Secara logika semua objek pada akhirnya hanya akan membentuk sebuah *cluster*. *Dendogram* biasanya digunakan untuk membantu memperjelas proses hierarki tersebut. Secara teori, beberapa metode untuk proses *clustering* diantaranya *Single Linkage*, metode ini akan mengelompokkan dua objek yang mempunyai jarak terdekat terlebih dahulu. Jika objek A dan B mempunyai jarak terdekat (misal 4,2) dibandingkan jarak A dan C (misal 8) atau B dan C (misal 5,6), maka proses hierarki pertama adalah mengelompokkan A – B. selanjutnya cluster A – B akan menambah anggotanya dengan mencari variabel dengan jarak terdekatnya. *Complete Linkage*, metode ini justru akan mengelompokkan dua objek yang mempunyai jarak terjauh terlebih dahulu, kemudian proses diteruskan untuk jarak antar-variabel yang semakin dekat. *Average Linkage*, metode ini akan mengelompokkan objek berdasarkan jarak rata-rata yang didapat dengan melakukan rata-rata semua jarak antar objek terlebih dahulu. *Ward's Method*, metode ini jarak dua *cluster* yang terbentuk dalam *sum of squares* di antara dua *cluster* tersebut. *Centroid Method*, metode ini jarak antara dua *cluster* adalah jarak di antara dua *centroid cluster* tersebut. *Centroid* adalah rata-rata jarak yang ada pada *cluster*, yang didapat dengan melakukan rata-rata pada semua anggota suatu *cluster* tertentu. Dengan metode ini, setiap terjadi *cluster* baru, segera terjadi perhitungan ulang *centroid*, sampai terbentuk *cluster* tetap.(2)

- 2) *Non-hierarchical method*, berbeda dengan metode hierarki, metode ini justru dimulai dengan menentukan terlebih dahulu jumlah *cluster* yang diinginkan. Setelah jumlah *cluster* diketahui, baru proses *cluster* dilakukan tanpa mengikuti proses hierarki. Metode ini biasa disebut dengan *K-Means Cluster*.
- d. Melakukan interpretasi (penamaan) terhadap cluster yang telah terbentuk, yang pada intinya memberi nama spesifik untuk menggambarkan isi cluster tersebut.
- e. Melakukan validasi dan *profiling cluster*, *cluster* yang terbentuk kemudian diuji apakah hasil tersebut valid. Kemudian dilakukan proses *profiling* untuk menjelaskan karakteristik setiap *cluster* berdasar profil tertentu.

3. Spesifikasi Model Ekonometrika

Model matematik yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan belanja modal dan Investasi terhadap pembangunan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari lima persamaan dengan mengacu indikator pembangunan ekonomi. Adapun model persamaan pembangunan ekonominya adalah sebagai berikut.

- a. Model Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

$$IPM_{it} = \alpha_i + \alpha_1 BM_{i,t-1} + \alpha_2 I_{i,t-1} + \epsilon_{i,t-1}$$

di mana:

- IPM : Indeks Pembangunan Manusia
 BM : Belanja Modal
 I : Investasi
 α : konstanta
 α_1 & α_2 : koefisien
 i : daerah
 t : tahun

- 1) Model Indikator Pertumbuhan Ekonomi (g)

$$g_{it} = \beta_i + \beta_1 BM_{i,t-1} + \beta_2 I_{i,t-1} + u_{i,t-1}$$

di mana:

- g : Pertumbuhan Ekonomi
 β : konstanta
 β_1 & β_2 : koefisien

- 2) Model Indikator Pendapatan Per Kapita (y)

$$y_{it} = \phi_i + \phi_1 BM_{i,t-1} + \phi_2 I_{i,t-1} + v_{i,t-1}$$

di mana:

- y : Pendapatan Per Kapita
 ϕ : konstanta
 ϕ_1 & ϕ_2 : koefisien

- 3) Model Indikator Penduduk Miskin (Pov)

$$Pov_{it} = \delta_i + \delta_1 BM_{i,t-1} + \delta_2 I_{i,t-1} + w_{i,t-1}$$

di mana:

- Pov : Kemiskinan
 δ : konstanta
 δ_1 & δ_2 : koefisien

- 4) Model Indikator Pengangguran Terbuka (U)

$$U_{it} = \psi_i + \psi_1 BM_{i,t-1} + \psi_2 I_{i,t-1} + u_{i,t-1}$$

di mana:

- U : Pengangguran
 ψ : konstanta
 ψ_1 & ψ_2 : koefisien

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelompokan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dengan Menggunakan Analisis Cluster

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui terdapat tiga *cluster* (tiga kelompok). Kabupaten/kota yang tergabung dalam kelompok satu cenderung memiliki kesamaan atau identitas pada variabel indeks pembangunan manusia dan laju pertumbuhan ekonomi. Pada kelompok dua cenderung ada kemiripan dalam dan persentase penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka. Kelompok tiga cenderung pada pendapatan perkapita. Kabupaten/kota yang terbagi dalam tiga kelompok tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

Kabupaten/Kota yang tergabung dalam kelompok satu adalah Kabupaten Cilacap, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Semarang dan Kota Pekalongan. Kelompok satu tersebut merupakan kumpulan kabupaten/kota yang cenderung memiliki kesamaan dalam pembangunan manusia dan laju pertumbuhan ekonomi. Kelompok dua terdiri atas Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Bora, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Salatiga, Kota Tegal. Pada kelompok ini cenderung memiliki kesamaan dalam persentase penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka. Kelompok ketiga hanya ada satu yaitu Kabupaten Kudus.

Memisahnya Kabupaten Kudus dari kabupaten/kota yang lain karena ada perbedaan dalam pendapatan perkapita. Hal ini disebabkan pendapatan perkapita Kabupaten Kudus dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2013 selalu bernilai paling besar. Pendapatan perkapita Kabupaten Kudus pada tahun 2005 sebesar 26,54 juta rupiah, sedangkan pada tahun 2013 meningkat menjadi 50,80 juta rupiah.

Tabel 1
Hasil Analisis Cluster Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005 – 2013

	Cluster		
	1	2	3
Indeks Pembangunan Manusia	72,3257 – 75,1451	00,000 – 71,3407	71,3408 – 72,3256
Laju Pertumbuhan Ekonomi	0,0479 – 0,0534	0,0395 – 0,0478	0,0000 – 0,0394
Pendapatan per kapita	16535146,0439	6482184,3450	33360803,0934
Persentase Penduduk Miskin	0,1021 – 0,1154	0,1153 – 0,1816	0,0000 – 0,1020
Tingkat Pengangguran Terbuka	0,0681 – 0,1135	0,665 – 0,0680	0,000 – 0,0664

Sumber: Data diolah, 2015

Pengelompokan tersebut didasarkan atas kemiripan variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan tingkat pembangunan ekonomi tinggi yaitu Kabupaten Kudus dan Kota Semarang yang berada dalam satu kelompok. Hal ini menunjukkan Kabupaten Kudus dan Kota Semarang memiliki tingkat pembangunan yang lebih baik dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah.

2. Pengaruh Belanja Modal dan Investasi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan hasil regresi diketahui nilai t hitung variabel belanja modal sebesar 0,918. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95 persen atau α 5 persen dan derajat kebebasan ($n-k-1$) diperoleh nilai t tabel yaitu sebesar 1,9785. Nilai t hitung $<$ nilai tabel ($0,918 < 1,9785$), sehingga t hitung berada di daerah penerimaan H_0 . H_0 diterima artinya belanja modal tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Variabel belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia juga ditunjukkan oleh nilai signifikansinya yang lebih besar dari nilai α yaitu $0,360 > 0,05$. Nilai t hitung variabel investasi sebesar 4,201. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95 persen atau α 5 persen dan derajat kebebasan ($n-k-1$) diperoleh nilai t tabel yaitu sebesar 1,9785. Karena nilai t hitung variabel investasi lebih kecil daripada t tabel ($4,201 > 1,9785$) sehingga t hitung berada di daerah penolakan H_0 . H_0 ditolak artinya variabel investasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hal tersebut juga didukung oleh nilai signifikansi variabel investasi yang lebih kecil dari nilai α nya ($0,04 < 0,05$).

Pengujian Pengaruh alokasi belanja modal dan investasi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) dilakukan dengan analisis regresi berganda. Hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh investasi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) secara parsial. Akan tetapi alokasi belanja modal tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini berarti investasi

berperan penting dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan belanja modal tidak berperan penting dalam mewujudkan indeks pembangunan manusia. Meskipun secara parsial tidak berpengaruh, akan tetapi secara bersama-sama keberadaan belanja modal dan investasi berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini menunjukkan interaksi keberadaan belanja modal dan investasi secara bersama-sama menentukan terhadap indeks pembangunan manusia. Berdasarkan hasil pengujian ini maka hipotesis kedua yang menyatakan alokasi belanja modal dan investasi mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah diterima

3. Pengaruh Belanja Modal dan Investasi Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi diketahui nilai t hitung variabel belanja modal sebesar 0,000. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95 persen atau α 5 persen dan derajat kebebasan ($n-k-1$) diperoleh nilai t tabel yaitu sebesar 1,9785. Nilai t hitung $>$ nilai tabel ($4,485 > 1,9785$), sehingga t hitung berada di daerah penolakan H_0 . H_0 ditolak berarti belanja modal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel belanja modal memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi juga ditunjukkan oleh nilai signifikansinya yang lebih kecil dari nilai α yaitu $0,000 < 0,05$. Nilai t hitung variabel investasi sebesar 1,183. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95 persen atau α 5 persen dan derajat kebebasan ($n-k-1$) diperoleh nilai t tabel yaitu sebesar 1,9785. Karena nilai $-t$ hitung variabel investasi lebih besar daripada $-t$ tabel ($1,183 > -1,9785$) sehingga $-t$ hitung variabel investasi berada di daerah penerimaan H_0 . H_0 diterima artinya variabel investasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut juga didukung oleh nilai signifikansi variabel investasi yang lebih besar dari nilai α nya ($0,239 > 0,05$). Berdasarkan hasil pengujian ini maka hipotesis ketiga yang

menyatakan alokasi belanja modal dan investasi mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah ditolak

4. Pengaruh Belanja Modal dan Investasi Terhadap Pendapatan per Kapita

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi diketahui nilai t hitung variabel belanja modal sebesar 4,073. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95 persen atau alpha 5 persen dan derajat kebebasan ($n-k-1$) diperoleh nilai t tabel yaitu sebesar 1,9785. Karena nilai t hitung $>$ nilai tabel ($4,073 > 1,9785$), sehingga t hitung berada di daerah penolakan H_0 . H_0 ditolak artinya bahwa belanja modal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan per kapita. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika pemerintah Kab/Kota menaikkan belanja modal nya akan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Pengaruh variabel belanja modal terhadap pendapatan per kapita juga ditunjukkan oleh nilai signifikansinya yang lebih kecil dari nilai alpha yaitu $0,000 < 0,05$. Nilai t hitung variabel investasi sebesar 4,060. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95 persen atau alpha 5 persen dan derajat kebebasan ($n-k-1$) diperoleh nilai t tabel yaitu sebesar 1,9785. Karena nilai t hitung variabel investasi lebih besar daripada t tabel ($4,060 < 1,9785$) sehingga nilai t hitung variabel investasi berada di daerah penolakan H_0 . H_0 ditolak mempunyai arti bahwa variabel investasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan per kapita. Hal ini menunjukkan bahwa Jika Pemerintah Kab/Kota meningkatkan investasinya akan memberikan dampak pada peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Pengaruh variabel investasi terhadap pendapatan per kapita juga didukung oleh nilai signifikansi variabel investasi yang lebih besar dari nilai alphanya ($0,000 > 0,05$).

Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan alokasi belanja modal dan investasi mempengaruhi pendapatan per kapita pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah diterima.

5. Pengaruh Belanja Modal dan Investasi Terhadap Persentase Penduduk Miskin

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi diketahui nilai t hitung variabel belanja modal sebesar -1,202. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95 persen atau alpha 5 persen dan derajat kebebasan ($n-k-1$) diperoleh nilai t tabel yaitu sebesar 1,9676. Karena nilai $-t$ hitung $>$ nilai $-t$ tabel ($-1,202 > -1,9676$), sehingga nilai $-t$ hitung berada di daerah penerimaan H_0 . H_0 diterima artinya belanja modal tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap persentase penduduk miskin. Variabel belanja modal tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel persentase penduduk miskin juga ditunjukkan oleh nilai

signifikansinya yang lebih besar dari nilai alpha yaitu $0,230 > 0,05$. Nilai t hitung variabel investasi sebesar -2,655. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95 persen atau alpha 5 persen dan derajat kebebasan ($n-k-1$) diperoleh nilai t tabel yaitu sebesar -1,9676. Karena nilai $-t$ hitung variabel investasi lebih kecil daripada $-t$ tabel ($-2,655 < -1,9774$) sehingga nilai $-t$ hitung variabel investasi berada di daerah penolakan H_0 . H_0 ditolak artinya variabel investasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap persentase penduduk miskin. Hal ini menunjukkan bahwa jika pemerintah kabupaten/kota meningkatkan investasinya maka persentase penduduk miskin akan mengalami penurunan. Pengaruh variabel investasi terhadap persentase penduduk miskin juga didukung oleh nilai signifikansi variabel investasi yang lebih kecil dari nilai alphanya ($0,008 < 0,05$).

Dengan demikian hipotesis kelima yang menyatakan alokasi belanja modal dan investasi mempengaruhi penduduk miskin pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah diterima.

6. Pengaruh Belanja Modal dan Investasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi diketahui nilai t hitung variabel belanja modal sebesar -0,971. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95 persen atau alpha 5 persen dan derajat kebebasan ($n-k-1$) diperoleh nilai t tabel yaitu sebesar -1,9785. Karena nilai $-t$ hitung $<$ nilai $-t$ tabel ($-0,971 < 1,9785$), sehingga nilai $-t$ hitung variabel belanja modal berada di daerah penolakan H_0 . H_0 ditolak artinya belanja modal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Pengaruh tersebut menunjukkan bahwa jika Pemerintah Kab/Kota meningkatkan belanja modalnya maka akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Pengaruh yang signifikan variabel belanja modal terhadap tingkat pengangguran terbuka juga ditunjukkan oleh nilai signifikansinya yang lebih kecil dari nilai alpha yaitu $0,552 < 0,05$. Nilai t hitung variabel investasi sebesar 0,597. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95 persen atau alpha 5 persen dan derajat kebebasan ($n-k-1$) diperoleh nilai t tabel yaitu sebesar 1,9785. Karena nilai t hitung variabel investasi lebih kecil daripada t tabel ($0,597 < 1,9785$) sehingga variabel investasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap persentase penduduk miskin. Hal tersebut juga didukung oleh nilai signifikansi variabel investasi yang lebih besar dari nilai alphanya ($0,545 > 0,05$).

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan tingkat pengangguran terbuka rendah berada di Kabupaten Cilacap, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Pekalongan dan Kabupaten

Kudus. Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat pengangguran terbuka rendah di mana peran alokasi belanja modal dan investasi jangka panjang dapat dirasakan, diimbangi dengan adanya pelabuhan, bandara, dan industri pengolahan serta bahan baku yang tersedia. Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tingkat pengangguran terbuka tinggi masih pada sektor pertanian dan sektor informal di mana pengelolaannya masih secara mandiri. Disamping masih berada di sektor pertanian dan informal, tingginya tingkat pengangguran terbuka disebabkan oleh kurang adanya pengembangan dan perluasan kesempatan kerja seperti kegiatan fasilitas penempatan kerja, pengembangan kewirausahaan, dan pemberian fasilitas guna mendorong sistem pendanaan, pelatihan berbasis masyarakat, serta kegiatan yang fokus pada penyiapan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing. Dengan demikian hipotesis keenam yang menyatakan alokasi belanja modal dan investasi mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah ditolak.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pengolahan data, penelitian ini memperoleh beberapa kesimpulan antara lain:

1. Terdapat beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan tingkat pembangunan ekonomi tinggi. Tingkat perekonomian dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu Kabupaten/Kota yang tergabung dalam kelompok satu adalah Kabupaten Cilacap, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Semarang dan Kota Pekalongan. Kelompok satu tersebut merupakan kumpulan kabupaten/kota yang cenderung memiliki kesamaan dalam pembangunan manusia dan laju pertumbuhan ekonomi. Kelompok dua terdiri atas Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Salatiga, Kota Tegal. Kelompok ketiga hanya ada satu yaitu Kabupaten Kudus.
2. Alokasi belanja modal dan investasi menunjukkan adanya pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia (IPM), di mana investasi mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) secara parsial sedangkan alokasi belanja modal tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini berarti investasi berperan penting dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan belanja modal tidak berperan penting dalam mewujudkan indeks pembangunan manusia. Meskipun secara parsial tidak berpengaruh, akan tetapi secara bersama-sama keberadaan belanja modal dan investasi berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini menunjukkan interaksi keberadaan belanja modal dan investasi secara bersama-sama menentukan terhadap indeks pembangunan manusia.
3. Alokasi belanja modal menunjukkan pengaruh secara parsial terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Adapun variabel investasi tidak berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi secara parsial. Hal ini berarti laju pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah ditentukan oleh belanja modal yang ada di tiap kabupaten/kota, sedangkan investasi tidak dijadikan sebagai variabel prediktor terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Secara bersama-sama variabel belanja modal dan investasi dapat dijadikan sebagai variabel untuk memprediksi laju pertumbuhan ekonomi.
4. Terdapat pengaruh alokasi belanja modal dan investasi terhadap pendapatan per kapita baik secara bersama-sama maupun secara parsial. Hal ini berarti pendapatan per kapita di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah ditentukan oleh belanja modal dan investasi yang ada di tiap kabupaten/kota.
5. Tidak adanya pengaruh alokasi belanja modal secara parsial. Hal ini menunjukkan persentase penduduk miskin yang ada di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tidak ditentukan oleh perubahan belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah setiap tahun. Hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh investasi terhadap penduduk miskin secara parsial. Pengaruh yang terjadi adalah pengaruh negatif, artinya peningkatan investasi mampu menurunkan persentase penduduk miskin. Hasil pengujian pengaruh secara bersama-sama diketahui alokasi belanja modal dan investasi mempengaruhi penduduk miskin pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat diketahui dari angka kemiskinan semakin menurun, jika dibandingkan dengan wilayah perkotaan dan pedesaan bahwa di wilayah perkotaan lebih rendah dibanding di pedesaan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa, pengeluaran rata-rata penduduk miskin di kota lebih tinggi daripada penduduk miskin di desa atau kabupaten.
6. Pengujian pengaruh alokasi belanja modal dan investasi terhadap tingkat pengangguran terbuka menunjukkan tidak adanya baik secara bersama-sama maupun secara parsial. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini belanja modal berdasarkan laporan realisasi APBD yang dipublikasikan oleh BPS dan

Kementerian Keuangan sedangkan investasi berasal dari penjumlahan antara realisasi investasi asing (penanam modal asing) dan investasi dalam negeri (penanam modal dalam negeri) Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah yang hanya di publikasikan oleh Badan Penanaman Modal Provinsi. Hal ini berarti tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah tidak ditentukan oleh belanja modal dan investasi yang ada di tiap kabupaten/kota, dikarenakan alokasi belanja modal dan investasi yang memiliki manfaat jangka panjang belum dapat memberikan pengaruh dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, sedangkan belanja pemerintah dan investasi jangka pendek dan menengah yang dapat memberikan pengaruh.

Saran

1. Belanja modal merupakan instrumen penting untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, dengan minimnya belanja modal diharapkan setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan kebijakan akan penambahan belanja modal guna mempercepat tujuan akan pembangunan ekonomi. Hal ini terutama di 29 Kabupaten/Kota yang termasuk dalam cluster dua, diantaranya Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Salatiga, Kota Tegal. Disamping itu Guna mempercepat tujuan akan pembangunan ekonomi pemerintah Kabupaten/Kota dapat meningkatkan kegiatan pelatihan kepada angkatan kerja yang telah tersedia sehingga hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan serta kesehatan dan pendidikan sebagai upaya peningkatan dan penyediaan tenaga kerja yang berkualitas di masa akan datang. Bagaimana agar hasil pembangunan ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan semata, namun peningkatan kualitas hidup manusia. Perlu dilakukan peningkatan kinerja pemerintah Kabupaten/Kota untuk mampu bersikap terbuka dan mampu mengurangi masalah lebih sederhana sekaligus tanpa mengorbankan nilai dasar pembangunan.
2. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk mengidentifikasi variabel bebas serta penambahan penggunaan dan penggabungan variabel independen yang bersifat kuantitatif dan kualitatif yang lebih banyak dalam memprediksi variabel indeks pembangunan manusia, laju Pertumbuhan Ekonomi, pendapatan perkapita, persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka serta

pengaruhnya terhadap kebijakan pemerintah yang relevan terhadap realisasi belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar A. dan Hadi S. 1996. Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan. Majalah Kajian Ekonomi dan Sosial. *Prisma Nomor Khusus 25 Tahun Prisma 1971-1996*.
- Arsyad, L. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Kelima. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2006-2014. *Jawa Tengah dalam Angka*.
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Ketenagakerjaan Penduduk Indonesia*.
- Badan Pusat Statistik. 2011-2014. *Indeks Pembangunan Manusia*.
- Barro, R.J. dan Xavier, S. M. 1999. *Economic Growth*. McGraw Hill Inc., New York.
- Baroroh, A. 2013. *Analisis Multivariat dan Time Series dengan SPSS 21*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Boediono, 1988, *Teori Pertumbuhan Ekonomi: Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.4*. BPFE, Yogyakarta.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Badan Penerbit Undip, Semarang
- Jhingan, M.L. 1999. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Juanda, B. 2007. *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. IPB PRESS, Bogor
- Nachrowi dan Hardius, U. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis; Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. LPFEUI, Jakarta.
- Nanga, M. 2005. *Makroekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Edisi Kedua. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*.
- Rahardja, P. dan Manurung, M. 2004. *Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar*. LPFE-UI, Jakarta.
- Santoso, S. 2008. *Mengatasi Berbagai Masalah Statistik dengan SPSS versi 11.5*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta.